

Hubungan antara Karakteristik Pegawai Universitas Islam Bandung dengan Tingkat Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional

¹Muhamad Fadhil, ²Titik Respati, ³M. Rizki Akbar

¹Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Universitas Islam Bandung, ²Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung,

³Departemen Kardiovaskular Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.

Email: muhammadfadhil282@gmail.com

Abstract. National Health Insurance program is a new government program which has been run since January 1st 2014. It is intended to guarantee Indonesian people to get their basic health needs, however it has not run effectively yet. The membership of this program affected by some factors, such as knowledge and the information about it. This study aimed to analyze the relationship between educational level and the Universitas Islam Bandung employees' knowledge about National Health Insurance. It was conducted using observational analytics with cross sectional approach. The subjects consist of 120 respondents. The data was obtained by questionnaire consist of the questions about National Health Insurance statistical analyzed used was chi-square method. The result shows that the employees' knowledge distribution about National Health Insurance are good 40%, moderate 22,5% and not satisfactory 37,5%. The result based on genders showed that there was no significant relationship with $p=0.720$, but based on age, educational status, length of work and source of information, there was significant relationship with $p=0.000$. It can be concluded that the Universitas Islam Bandung employees' knowledge about National Health Insurance is moderate. There were significant relationship between age, educational status, length of work and source information with benefits, duty and procedures of National Health Insurance.

Keywords : Knowledge, Employees, Characteristic, National Health Insurance

Abstrak. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program baru dari pemerintah yang dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Program ini bertujuan untuk menjamin agar warga negaranya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak terutama kesehatan. tetapi pada kenyataannya program tersebut belum berjalan dengan baik. Kepesertaan dari program JKN dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan pegawai Universitas Islam Bandung (Unisba) mengenai JKN. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan *crosssectional*, Subjek terdiri dari 120 responden dilingkungan Unisba. Pengambilan data menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang JKN. Analisis statistik bivariat menggunakan *Chi square*. Hasil penelitian menunjukkan distribusi tingkat pengetahuan pegawai tentang JKN yang mempunyai kategori baik 40%, cukup 22,5%, sedangkan kurang 37,5%. Hubungan antara tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin tidak bermakna dengan $p=0,720$, sedangkan usia, pendidikan, lama kerja dan sumber informasi menunjukkan hubungan yang bermakna dengan $p=0,000$. Disimpulkan terdapat hubungan antara usia, pendidikan, lama kerja dan sumber informasi dengan aspek manfaat, kewajiban dan prosedur dengan tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Kata kunci: JKN, Karakteristik, Pegawai, Pengetahuan

A. Pendahuluan

Dalam deklarasi perserikatan bangsa-bangsa tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia. pada pasal 25 ayat (1) deklarasi menyatakan setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda atau duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang

mengakibatkan kekurangan nafkah yang berada diluar kemampuannya.¹ Dalam falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga terdapat di dalam UUD 45 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diamandemen dan diganti dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.² Demi terwujudnya hak-hak tersebut, pemerintah bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan jaminan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kesehatan perseorangan.² Sebelum itu usaha pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan sudah ada yaitu melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), jaminan kesehatan tersebut masih terbagi-bagi dan biaya serta mutu pelayanan kesehatan menjadi sulit terkendali. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di dalam Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³ Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai pada 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI);⁴ Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (*Roadmap* Jaminan Kesehatan Nasional).⁵

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, Kementerian Kesehatan mendukung dan memberikan prioritas kepada jaminan kesehatan dalam reformasi kesehatan. Kementerian Kesehatan tengah mengupayakan suatu regulasi berupa Peraturan Menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Peraturan Menteri juga akan mengatur jenis dan plafon harga alat bantu kesehatan. Sebuah institusi memberikan fasilitas berupa jaminan kesehatan bagi para pegawainya, dimana jaminan kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu penting bagi seluruh pegawai untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan dan memanfaatkan dengan baik jaminan kesehatan tersebut yaitu dengan cara memiliki pengetahuan dan juga pemahaman akan jaminan kesehatan, agar terciptanya masyarakat yang mandiri dan sehat. Berdasarkan latar belakang diatas demi terlaksananya program tersebut dibutuhkan bantuan dan juga kerjasama berupa pengetahuan dan karakteristik dari berbagai pihak untuk kelancaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mengetahui hubungan karakteristik dengan tingkat pengetahuan pegawai di Universitas Islam Bandung.

B. Bahan dan Metode Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah seluruh pegawai Universitas Islam Bandung yang terdaftar sebagai pegawai. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Universitas Islam Bandung yang terdaftar sebagai pegawai dengan jumlah 120 pegawai. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat ukur, dengan metode analitik observasional melalui pendekatan *cross sectional*.

Bahan penelitian ini, data yang diperlukan adalah data primer, yaitu jenis data yang diperoleh langsung dari responden dengan membagikan kuesioner dengan pernyataan pilihan. Responden pada penelitian ini adalah pegawai Universitas Islam Bandung.

Prosedur penelitian terdiri dari proses pembuatan proposal, pembuatan kuesioner, validasi dan reliabilitas kuesioner, permohonan izin pada pihak yang dipilih menjadi sumber penelitian, pengisian kuesioner, menganalisis tingkat pengetahuan tentang JKN, membuat laporan akhir.

C. Hasil Penelitian

Tingkat pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional pada pegawai Universitas Islam Bandung dilihat dari berbagai aspek, dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Distribusi Pengetahuan JKN Secara Umum berdasarkan karakteristik

	Pengetahuan JKN Umum			Signifikansi
	Baik N (%)	Cukup N (%)	Kurang N (%)	
Jenis Kelamin				
• Laki-laki	26 (42,6)	12 (19,7)	23 (37,7)	0,720
• Perempuan	22 (37,3)	15 (25,4)	22 (37,3)	
Usia				
• 20-35 tahun	17 (23,9)	19 (26,8)	35 (49,3)	0,000*
• 36-55 tahun	31 (63,3)	8 (16,3)	10 (20,4)	
Pendidikan				
• SMP	0	0	5 (100)	0,000*
• SMA	5 (8,6)	14 (24,1)	39 (67,2)	
• Diploma	2 (33,3)	4 (66,7)	0	
• Sarjana	41 (80,4)	9 (17,6)	1 (2)	
Lama Kerja				
• 1-15 tahun	36 (33,3)	27 (25)	45 (41,7)	0,000*
• 16-25 tahun	12 (100)	0	0	
Sumber Informasi				
• Kampus	43 (75,4)	13 (22,8)	1 (1,8)	0,000*
• Koran	1 (9,1)	3 (27,3)	7 (63,6)	
• Radio	0	0	1 (100)	
• TV	4 (7,8)	11 (21,6)	36 (70,6)	

Keterangan : * uji *Fischer exact test* karena terdapat sel dengan nilai <5

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa responden laki-laki berjumlah 61%. Mayoritas usia antara 20-35 tahun sebanyak 71%. dengan tingkat pendidikan adalah tingkat SMA yaitu 58%. Lama kerja yaitu 108%. mayoritas responden mendapatkan informasi dari kampus yaitu 57%.

Tabel 2 Distribusi Pengetahuan Aspek Manfaat JKN Berdasarkan Karakteristik

	Pengetahuan Aspek Manfaat JKN			Signifikansi
	Baik N (%)	Cukup N (%)	Kurang N (%)	
Jenis Kelamin				
• Laki-laki	30 (49,2)	12 (19,7)	19 (31,1)	0,275
• Perempuan	23 (39)	19 (32,2)	17 (28,8)	
Usia				
• 20-35 tahun	21 (29,6)	22 (31)	28 (39,4)	0,000*
• 36-55 tahun	32 (65,3)	9 (18,4)	8 (16,3)	
Pendidikan				
• SMP	0	1 (20)	4 (80)	0,000*
• SMA	11 (19)	15 (25,9)	32 (55,2)	
• Diploma	3 (50)	3 (50)	0	
• Sarjana	39 (76,5)	12 (23,5)	0	
Lama Kerja				
• 1-15 tahun	42 (38,9)	30 (27,8)	36 (33,3)	0,000*
• 16-25 tahun	11 (91,7)	1 (8,3)	0	
Sumber Informasi				
• Kampus	42 (73,7)	15 (26,3)	0	0,000*
• Koran	3 (27,3)	1 (9,1)	7 (63,6)	
• Radio	0	0	1 (100)	
• TV	8 (15,7)	15 (29,4)	28 (54,9)	

Keterangan : * uji *Fischer exact test* karena terdapat sel dengan nilai <5

Pada tabel 2 terlihat bahwa responden laki-laki lebih baik dalam mengetahui tentang manfaat dari JKN yaitu sebanyak (30%) dibandingkan dengan perempuan yaitu (23%). Responden berusia usia 36-55 tahun lebih baik dalam mengetahui tentang manfaat JKN yaitu sebanyak (32%) dibandingkan dengan usia 20-35 tahun yaitu sebanyak (21%). Pada responden pendidikan tingkat sarjana lebih baik dalam mengetahui tentang manfaat JKN yaitu sebanyak (39%) dibandingkan dengan SMA yaitu (11%). Pada responden dilihat dari lama kerja 1-15 tahun yang lebih baik dalam mengetahui tentang manfaat JKN yaitu sebanyak (42%) dibandingkan dengan lama kerja 16-25 tahun yaitu (11%). Pada responden dilihat dari sumber informasi yang didapatkan melalui kampus, yang lebih baik dalam mengetahui tentang manfaat JKN yaitu sebanyak (42%) dibandingkan dengan radio yaitu (0%).

Tabel 3 Distribusi Pengetahuan Aspek Kewajiban JKN Berdasarkan Karakteristik

	Pengetahuan Aspek Kewajiban JKN			Signifikansi
	Baik N (%)	Cukup N (%)	Kurang N (%)	
Jenis Kelamin				
• Laki-laki	26 (42,6)	17 (27,9)	18 (29,5)	0,246
• Perempuan	19 (32,2)	14 (23,7)	26 (44,1)	
Usia				
• 20-35 tahun	16 (22,5)	21 (29,6)	34 (47,9)	0,000*
• 36-55 tahun	29 (59,2)	10 (20,4)	10 (20,4)	
Pendidikan				
• SMP	0	2 (40)	3 (60)	0,000*
• SMA	5 (8,6)	17 (29,3)	36 (62,1)	
• Diploma	3 (50)	1 (16,7)	2 (33,3)	
• Sarjana	37 (72,5)	11 (21,6)	3 (5,9)	
Lama Kerja				
• 1-15 tahun	34 (31,5)	30 (27,8)	44 (40,7)	0,000*
• 16-25 tahun	11 (91,7)	1 (8,3)	0	
Sumber Informasi				
• Kampus	40 (70,2)	12 (21,1)	5 (8,8)	0,000*
• Koran	0	2 (18,2)	9 (81,8)	
• Radio	0	0	1 (100)	
• TV	5 (9,8)	17 (33,3)	29 (56,9)	

Keterangan : * uji *Fischer exact test* karena terdapat sel dengan nilai <5 .

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa responden laki-laki lebih baik dalam mengetahui tentang kewajiban dari JKN yaitu sebanyak (26%) dibandingkan dengan perempuan yaitu (19%). Pada responden usia, mayoritas usia 36-55 tahun lebih baik dalam mengetahui tentang kewajiban JKN yaitu sebanyak (29%) dibandingkan dengan usia 20-35 tahun yaitu sebanyak (16%). Pada responden pendidikan tingkat sarjana lebih baik dalam mengetahui tentang kewajiban JKN yaitu sebanyak (37%) dibandingkan dengan SMP yaitu (0%). Pada responden dilihat dari lama kerja 1-15 tahun yang lebih baik dalam mengetahui tentang kewajiban JKN yaitu sebanyak (34%) dibandingkan dengan lama kerja 16-25 tahun yaitu (11%). Pada responden dilihat dari sumber informasi yang didapatkan melalui kampus, yang lebih baik dalam mengetahui tentang kewajiban JKN yaitu sebanyak (40%) dibandingkan dengan radio yaitu (0%) karena tidak ada yang mendapatkan informasi melalui radio.

Tabel 4 Distribusi Pengetahuan Aspek Prosedur JKN Berdasarkan Karakteristik

	Pengetahuan Aspek Prosedur JKN			Signifikansi
	Baik N (%)	Cukup N (%)	Kurang N (%)	
Jenis Kelamin				
• Laki-laki	27 (44,3)	10 (16,4)	24 (39,3)	0,980
• Perempuan	27 (45,8)	9 (15,3)	23 (39)	
Usia				
• 20-35 tahun	25 (35,2)	9 (12,7)	37 (52,1)	0,002*
• 36-55 tahun	29 (59,2)	10 (20,4)	10 (20,4)	
Pendidikan				
• SMP	0	0	5 (100)	0,000*
• SMA	10 (17,2)	8 (13,8)	40 (69)	
• Diploma	3 (50)	3 (50)	0	
• Sarjana	41 (80,4)	8 (15,7)	2 (3,9)	
Lama Kerja				
• 1-15 tahun	43 (39,8)	18 (16,7)	47 (43,5)	0,001*
• 16-25 tahun	11 (91,7)	1 (8,3)	0	
Sumber Informasi				
• Kampus	44 (77,2)	11 (19,3)	2 (3,5)	0,000*
• Koran	2 (18,2)	1 (9,1)	8 (72,7)	
• Radio	0	0	1 (100)	
• TV	8 (15,7)	7 (13,7)	36 (70,6)	

Keterangan : * uji *Fischer exact test* karena terdapat sel dengan nilai <5

Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa responden laki-laki dan perempuan seimbang dalam mengetahui tentang prosedur dari JKN yaitu sebanyak (27%). Pada responden usia, mayoritas usia 36-55 tahun lebih baik dalam mengetahui tentang prosedur JKN yaitu sebanyak (29%) dibandingkan dengan usia 20-35 tahun yaitu sebanyak (25%). Pada responden pendidikan tingkat sarjana lebih baik dalam mengetahui tentang prosedur JKN yaitu sebanyak (41%) dibandingkan dengan SMP yaitu (0%). Pada responden dilihat dari lama kerja 1-15 tahun yang lebih baik dalam mengetahui tentang prosedur JKN yaitu sebanyak (43%) dibandingkan dengan lama kerja 16-25 tahun yaitu (11%). Pada responden dilihat dari sumber informasi yang didapatkan melalui kampus, yang lebih baik dalam mengetahui tentang prosedur JKN yaitu sebanyak (44%) dan dengan radio yaitu (0%).

D. Pembahasan

Penelitian ini ditujukan pada seluruh pegawai Universitas Islam Bandung, dengan jumlah keseluruhan 120 pegawai, perempuan berjumlah 59 pegawai dan laki-laki berjumlah 61 pegawai. Sumber informasi yang digunakan dalam mencari informasi dalam mengetahui tentang JKN adalah adalah kampus, koran, radio dan televisi.

Secara umum, tingkat pengetahuan responden adalah cukup. Responden yang mendapatkan informasi dari kampus yaitu berupa seminar yang telah dilakukan oleh pihak institusi tetapi masih belum merata karena masih banyak pegawai khususnya yang tingkat pendidikannya tidak tinggi masih kurang dalam mengetahui informasi tentang

JKN, koran, radio dan televisi tentang pengetahuan JKN nya dalam kategori baik dan kurang. Sedangkan yang pengetahuan JKN nya dalam kategori cukup hanya sebagian kecil saja.

Pada responden tingkat pengetahuan JKN secara umum untuk jenis kelamin pada uji analisis Chi square hasilnya kurang dari 0,5 maka hasil tersebut tidak bermakna dan tidak terdapat adanya hubungan, sedangkan pada usia, pendidikan, lama kerja dan sumber informasi bermakna dan terdapat hubungan. Pada responden tingkat pengetahuan JKN berdasarkan aspek manfaat, kewajiban dan prosedur bermakna dan terdapat hubungan.

Pengetahuan responden menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan mengenai JKN di Universitas Islam Bandung. Menurut Notoatmodjo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan pada seseorang yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya terdiri dari umur, pendidikan dan pekerjaan yang jelas didalam hasil analisis didapatkan hasil sangat mempengaruhi pegawai dalam memahami pengetahuan tentang JKN.⁸

Hulock (1998) menyatakan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Pendidikan diperlukan untuk mendapatkan informasi, sedangkan pekerjaan harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga menurut Thomas yang dikutip Nursalam (2003). Sementara itu, faktor eksternal dibagi menjadi 2, yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok dan sosial budaya yang dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi, didalam hasil analisis faktor eksternal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan pegawai tentang JKN.⁸

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan, diantaranya adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama kerja dan sumber informasi. Hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi dalam mengukur tingkat pengetahuan. Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki rata-rata usia 20-35 tahun tetapi yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai JKN adalah usia 36-55 tahun, yaitu sebesar (31%). Sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan hingga SMA, tetapi yang memiliki tingkat pengetahuan lebih baik mengenai JKN adalah tingkat pendidikan hingga sarjana, yaitu sebesar (41%). Dan pada responden dilihat dari lama kerja yang memiliki pengetahuan lebih baik mengenai JKN adalah pada lama kerja dari 1-15 tahun, yaitu sebesar (36%). Sedangkan pada responden yang memiliki tingkat pengetahuan mengenai JKN yang mendapatkan sumber informasi dari kampus lebih baik tingkat pengetahuannya yaitu sebesar (43%).

Menurut peneliti faktor lain seperti faktor lingkungan dan sosial budaya juga mempengaruhi penelitian ini, karena di Universitas Islam Bandung akses pegawai untuk mengetahui tentang informasi mengenai JKN masih kurang maksimal dalam pemerataan sumber informasinya. Dari pembahasan diatas, penelitian ini mendukung teori mengenai faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut Notoatmodjo.

E. Kesimpulan

Secara umum, gambaran pengetahuan pegawai Universitas Islam Bandung mengenai JKN dilihat dari karakteristik dan aspek manfaat, kewajiban, dan prosedur yaitu termasuk dalam kategori cukup. Dan tidak terdapat adanya hubungan jenis

kelamin dengan tingkat pengetahuan, sedangkan usia, pendidikan, lama kerja dan sumber informasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan.

F. Pertimbangan Masalah Etik

Penelitian memperhatikan aspek etik diantaranya *autonomy* (mengutamakan pilihan calon responden), *beneficience* (subjek mendapatkan keuntungan dari penelitian ini), *non maleficence* (subjek tidak dirugikan atas penelitian yang dilakukan), dan *justice* (setiap orang diperlakukan secara adil).

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada seluruh pegawai Universitas Islam Bandung yang telah berpartisipasi dan bersedia menjadi responden pada penelitian ini, serta semua pihak yang telah membantu hingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

Daftar Pustaka

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (diunduh 24 Januari 2015). Tersedia dari: www.kontras.org

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (diunduh 24 Januari 2015). Tersedia dari: www.itjen.depkes.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran (diunduh 25 Januari 2015). Tersedia dari: www.jkn.kemkes.go.id

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (diunduh 25 Januari 2015). Tersedia dari: www.jkn.kemkes.go.id

Badan Pusat Statistik. Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Tahun 1971,1980,1990,1995,2000,2010 (diunduh 25 Januari 2015). Tersedia dari: www.bps.go.id

BPJS Kesehatan. Tersedia dari: www.bpjs-kesehatan.go.id

Wawan, A MD. Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Prilaku. Yogyakarta: Nuha Medika; 2010.

Soekidjo N. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. 2010th edt. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.

Peningkatan Keadaan Kesehatan Indonesia (diunduh 27 Januari 2015). Tersedia dari: www.siteresources.worldbank.org

Prosedur Pelayanan Kesehatan. Tersedia dari: www.jamsosindonesia.com

Mengajar MB. Asuransi Kesehatan dan Managed Care (diunduh 27 Januari 2015). Tersedia dari: www.pustaka.unpad.ac.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (diunduh 27 Januari 2015). Tersedia dari: www.depkes.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (diunduh 27 Januari 2015). Tersedia dari: www.kpi.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (diunduh 31 Januari 2015). Tersedia dari: www.mastel.or.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (diunduh 31 Januari 2015). Tersedia dari: www.jkn.kemkes.go.id

Laurina C, Maabuat L, Maramis F.R.R, Sondakh R. C. Hubungan Antara Pengetahuan dan Tingkat Pendidikan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Waonasa Kecamatan Singkil Manado Tahun 2013. 2013.(diunduh 25 Juni 2015); Terdapat pada: <http://fkm-unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/christin-maabuat.pdf>